



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 Januari 2025

Halaman: 2

15 Pedagang Belum Dapat Lapak di Lokasi Baru

Datangi Gedung DPRD untuk Minta Kejelasan

JOGJA - Puluhan pedagang Teras Malioboro melakukan aksi di Gedung DPRD DIJ, kemarin (24/1). Mereka mengeluhkan permasalahan pasca-Pemprov DIJ melakukan relokasi pedagang di lokasi Ketandan dan Beskalan.

Massa aksi mendatangi Gedung DPRD DIJ sekitar pukul 14.00. Kedatangan mereka sekaligus melakukan audiensi yang dihadiri pihak pengelola Teras Malioboro di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIJ. Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPRD DIJ Imam Taufik.

"Audiensi ini kami menyampaikan keresahan para pedagang yang mendapatkan lapak tidak layak. Bahkan ada 15 pedagang yang belum mendapatkan hak (lapak)-nya," ujar Kepala Paguyuban Tri Dharma Supriyati saat ditemui pascaaudiensi kemarin (24/1).

Menurutnya, pasca relokasi pedagang, delapan anggota Paguyuban Tri Dharma hingga saat ini nasibnya masih terlon-tang-lantung dan belum mendapatkan lapak. Selain itu, dari Paguyuban Girli juga terdapat ada tujuh pedagang yang belum mendapatkan lapak di lokasi baru.



"Selain itu, pengelola Teras Malioboro telah memberikan informasi kepada pedagang apabila sampai tanggal 25 Januari tidak buka maka akan dikenakan surat peringatan (SP)," tuturnya. Pihaknya mengakui beberapa pedagang

memang sampai saat ini belum mulai berjualan. Alasannya, karena keterbatasan modal untuk memulai jualan. "Kami harus cari modal lagi untuk menyediakan produk yang akan dipajang itu," bebarnya. Ia juga mengatakan masih ditemukan

16 lapak siluman, yakni lapak yang didapat dengan cara yang tidak benar. Data itu sudah tertulis di hasil rekomendasi pansus di DPRD Kota Jogja dari tahun 2023.

"Hasilnya belum ada kepastian, tapi mereka berjanji 31 Januari akan mengun-

SAMPAIKAN ASPIRASI: Sejumlah pedagang eks Teras Malioboro 2 melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi DIJ, kemarin (24/1). Mereka mengeluhkan permasalahan relokasi di Teras Malioboro Ketandan dan Beskalan, seperti lapak yang tidak layak dan terdapat 15 pedagang yang belum mendapatkan lapak.

dang kepala Dinkop UKM DIJ," jelasnya. Sebanyak 15 pedagang yang belum mendapatkan lapak itu sudah dikomunikasikan dengan pihak pengelola. Namun sampai saat ini dirinya belum mendapatkan jawaban yang pasti. "Akses komunikasi (dengan pengelola) ditutup rapat," keluhnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Imam Taufik akan berkomunikasi dengan DPRD Kota Jogja untuk menindak lanjut usulan pedagang dalam audiensi itu. Selain itu, ia juga akan menyampaikan kepada Komisi B DPRD DIJ untuk segera melaksanakan rapat kerja dengan mengundang Dinkop UKM DIJ.

"Tuntutan sih banyak, termasuk masa transisi ini mereka minta diberikan jaminan hidup (Jadup). Tapi *kan* itu butuh anggaran," jelasnya. Ia berharap setelah rapat kerja itu ada *win-win solution* antara pedagang dengan pihak pengelola, dalam hal ini Dinkop UKM DIJ.

Suasana audiensi berlangsung cukup tegang. Pihak pedagang menuntut kecepatan waktu adanya rapat kerja. Di sisi lain, pihak DPRD DIJ membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Alhasil, karena masuk libur panjang maka ditentukan rapat kerja lanjutan akan diadakan paling lambat 31 Januari, khusus membahas proses penempatan pedagang di Teras Malioboro. (oso/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005